

Pelatihan Manajemen Media Sosial untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Muhammad Zakaria *¹

Nilfatri ²

Wandi ³

Alisyah Pitri ⁴

Nilfatri ⁵

Reza Okva Marwendi ⁶

Arif Mustofa ⁷

Al Munif ⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: zakariapramana23@gmail.com, alisyahpitri31@gmail.com, fatrinil51@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan manajemen media sosial terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam memanfaatkan media sosial secara efektif untuk meningkatkan interaksi publik dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelatihan tentang pengelolaan media sosial dapat meningkatkan kemampuan staf DPRD dalam mengelola komunikasi publik secara lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen pre-test dan post-test. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengukuran perubahan pengetahuan serta keterampilan staf sebelum dan setelah pelatihan. Responden penelitian adalah 30 staf DPRD yang terlibat dalam pengelolaan media sosial. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan perbandingan skor pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, dengan skor rata-rata meningkat sebesar 35%. Selain itu, interaksi masyarakat di media sosial DPRD juga meningkat, yang mencerminkan peningkatan partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model pelatihan media sosial bagi lembaga legislatif daerah, serta kontribusi teoretis dalam mengembangkan konsep digital governance dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan media sosial yang lebih efektif.

Kata Kunci: pelatihan manajemen media sosial, transparansi, akuntabilitas, digital governance, partisipasi publik, DPRD, komunikasi publik.

Abstract

This study aims to analyze the impact of social media management training on improving transparency and accountability at the DPRD Office of Tanjung Jabung Timur Regency. With the development of digital technology, local governments face challenges in effectively utilizing social media to enhance public interaction and information transparency. Therefore, this study focuses on how training in social media management can improve the DPRD staff's ability to manage public communication in a more transparent and accountable manner. The approach used is quantitative research with a pre-test and post-test experimental design. Data were collected through interviews, observations, and measurements of staff knowledge and skills before and after the training. The research respondents consisted of 30 DPRD staff members involved in social media management. Data analysis techniques involved descriptive statistics and comparison of pre-test and post-test scores. The results show a significant increase in participants' understanding and skills, with an average score improvement of 35%. Additionally, public interaction on the DPRD's social media also increased, reflecting enhanced public participation. This research provides practical contributions in developing a social media training model for regional legislative bodies, as well as theoretical contributions in advancing the concept of digital governance in the context of local government. Therefore, the findings of this study can serve as a reference for other local governments to improve transparency and accountability through more effective use of social media.

Keywords: *social media management training, transparency, accountability, digital governance, public participation, DPRD, public communication.*

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, transparansi dan akuntabilitas menjadi isu strategis, mengingat tantangan dalam pengelolaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena ini tercermin dari rendahnya persepsi publik terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga legislatif daerah. Dalam era digital, media sosial memiliki potensi besar sebagai saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, pemanfaatan media sosial oleh Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum optimal, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen media sosial.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Nainggolan 2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa media sosial meningkatkan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada instansi pemerintah pusat dan belum banyak meneliti implementasinya di tingkat legislatif daerah. Penelitian oleh (Rahmanto 2022) juga mendukung bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan transparansi pemerintah dan partisipasi warga, namun belum mengidentifikasi secara spesifik tantangan yang dihadapi oleh DPRD dalam pengelolaan media sosial. Selain itu, (Santoso 2025a) menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, namun belum ada kajian yang mengaitkan pelatihan manajemen media sosial dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tingkat DPRD.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan manajemen media sosial bagi staf Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola media sosial secara efektif, sehingga dapat memperbaiki kualitas komunikasi publik, meningkatkan transparansi informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang peran media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat legislatif daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi instansi legislatif lainnya dalam mengelola media sosial sebagai alat untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis bagi Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi pelatihan manajemen media sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks lokal dan dinamika interaksi antara staf DPRD dan masyarakat melalui media sosial (Arianto 2023). Proses penelitian dimulai dengan analisis kebutuhan melalui wawancara dengan pejabat terkait dan observasi terhadap praktik komunikasi yang ada. Selanjutnya, tim pengabdian merancang modul pelatihan yang mencakup strategi komunikasi digital, manajemen konten, dan etika penggunaan media sosial. Pelatihan dilaksanakan secara daring dan luring, disesuaikan dengan kondisi peserta dan fasilitas yang tersedia (Ningsih 2022).

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta. Selain itu, dilakukan observasi lanjutan terhadap

penggunaan media sosial oleh staf DPRD setelah pelatihan, serta analisis konten untuk menilai peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Goenawan and Jati 2025). Metode ini sejalan dengan prinsip Participatory Action Research (PAR), yang menekankan kolaborasi aktif antara peneliti dan masyarakat dalam setiap tahap penelitian (Afandi 2022). Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang aplikatif dan berkelanjutan bagi Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengelola media sosial sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pelatihan manajemen media sosial di Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut. Sebelum pelatihan, staf DPRD memiliki pemahaman terbatas tentang penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi publik. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan mereka dalam merancang konten yang informatif, responsif terhadap pertanyaan masyarakat, dan menjaga etika komunikasi digital. Data pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan skor rata-rata sebesar 35%, mencerminkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi staf. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Santoso 2025a) yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain itu, observasi terhadap aktivitas media sosial DPRD pasca-pelatihan menunjukkan peningkatan interaksi publik. Jumlah komentar, like, dan share pada unggahan resmi meningkat hingga 40%, menandakan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini konsisten dengan temuan yang menyatakan bahwa media sosial dapat memperkuat hubungan antara legislatif dan masyarakat melalui komunikasi dua arah.

Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam implementasi pelatihan. Beberapa staf masih mengalami kesulitan dalam mengelola konten secara konsisten dan profesional, terutama dalam menghadapi komentar negatif atau kritikan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lanjutan yang lebih mendalam mengenai manajemen krisis dan komunikasi dalam situasi konflik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses internet di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan media sosial.

Dari perspektif teori, temuan ini mendukung konsep *digital governance* yang menekankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pemerintahan (Santoso 2025b). Selain itu, teori *social media governance* yang dikembangkan oleh (Arianto 2023) juga relevan, di mana pengelolaan media sosial yang baik dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga publik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pelatihan manajemen media sosial bagi lembaga legislatif daerah. Model ini dapat diadaptasi oleh DPRD di daerah lain untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan mencakup evaluasi jangka panjang terhadap dampak penggunaan media sosial terhadap persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas DPRD, serta pengembangan modul pelatihan yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi terkini.

KESIMPULAN

Kesimpulan Keseluruhan

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pelatihan manajemen media sosial yang diberikan kepada staf Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan komunikasi publik. Temuan utama menunjukkan bahwa, setelah pelatihan, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta mengenai penggunaan media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat, memperbaiki transparansi informasi, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislatif.

Peningkatan yang terukur dalam skor pre-test dan post-test serta interaksi publik yang lebih aktif pada media sosial DPRD menjadi bukti kuat bahwa pelatihan ini efektif. Selain itu,

temuan ini juga mengkonfirmasi pentingnya pengelolaan media sosial yang etis dan profesional dalam mempertahankan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga legislatif. Meskipun demikian, tantangan seperti pengelolaan konten yang konsisten dan keterbatasan infrastruktur tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep *digital governance* dan *social media governance*, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang penerapan media sosial dalam konteks legislatif, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat diadaptasi oleh DPRD di daerah lain. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan evaluasi jangka panjang terkait dampak penggunaan media sosial terhadap persepsi publik dan pengembangan lebih lanjut dari model pelatihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. 2022. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. UIN Jakarta Press. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71356/1/Buku.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Arianto, B. 2023. "Tata Kelola Media Sosial Sebagai Institusionalisasi Praktik Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia." *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 16 (2): 106–27. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>.
- Goenawan, W J, and R P Jati. 2025. "Penerapan Media Sosial Untuk Transparansi Publik: Studi Optimalisasi Instagram Oleh LLDIKTI Wilayah III." *Journal Scientific of Mandalika* 6 (2): 317–28. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss2pp317-328>.
- Nainggolan, R. 2024. "Peran Platform Media Sosial Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Direktorat Jenderal Pajak." *Opini Kemenkeu*. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/peran-platform-media-sosial-instagram-dalam-membangun-kepercayaan-publik-terhadap-direktorat-jenderal-pajak>.
- Ningsih, I N D K. 2022. "Pelatihan Pengelolaan Media Sosial Dan Foto Produk Bagi Kelompok Informasi Masyarakat." *Jurnal Abdi Masyarakat Lestari* 5 (1): 1–8. <https://doi.org/10.22219/jamali.v5i1.22573>.
- Rahmanto, A N. 2022. "Media Sosial Dan Persepsi Publik Tentang Good Governance Pada Pemerintah Daerah Di Solo Raya." *Jurnal Komunikasi* 10 (1): 45–60. <https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/6433>.
- Santoso, I A P. 2025a. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2 (3): 1–10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>.
- . 2025b. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2 (3): 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>.